

Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tantangan dan Prospek Masa Depan

Angga Syahputra¹, Isnaini Harahap², Zuhri M. Nawawi³, Kaswinata⁴

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴STEBIS Al-Ulum Terpadu

¹Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No.1, Alue Awe – Lhokseumawe, Indonesia

E-mail: anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak,

Penelitian ini mengkaji distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia melalui lensa ekonomi syariah. Dengan berfokus pada prinsip-prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam, penelitian ini mendalami tentang ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan di Indonesia masih tinggi, menciptakan jurang yang membesar antara kelompok kaya dan miskin. Analisis mendalam mengungkapkan pentingnya peran ekonomi syariah, zakat, infaq, dan lembaga keuangan syariah dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Penelitian juga mencermati tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan menyajikan strategi inovatif untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Fokus pada zakat dan infaq sebagai instrumen redistribusi yang potensial memperlihatkan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan landasan bagi kebijakan inklusif dan adil, memandu langkah-langkah Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, penelitian ini mengemukakan cara untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara global.

Kata Kunci: Distribusi Pendapatan, Kemiskinan, Ekonomi Islam

Abstract,

This research examines income distribution and poverty in Indonesia through the lens of Islamic economics. By focusing on the principles of inclusiveness, fairness, and sustainability in Islamic economics, this research goes in-depth on economic inequality and poverty in Indonesia through a descriptive qualitative approach. The findings show that despite a decline in poverty, income inequality in Indonesia is still high, creating a widening gap between the rich and poor. In-depth analysis reveals the important role of Islamic economics, zakat, infaq, and Islamic financial institutions in addressing inequality and poverty. The research also examines the challenges in implementing Islamic economic principles and presents innovative strategies to improve income distribution. The focus on zakat and infaq as potential redistribution instruments highlights the need for a more structured and sustainable approach. This research provides a foundation for inclusive and equitable policies, guiding Indonesia's steps towards equitable and sustainable economic growth. By integrating Islamic economic principles, this research suggests ways to create a more just and prosperous society, in accordance with Islamic principles and global sustainable development principles.

Keywords: Income Distribution, Poverty, Islamic Economy

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, menghadapi dinamika kompleks dalam mengelola distribusi pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 9,36 persen, mengalami penurunan sebesar 0,21 persen poin dari September 2022, dan 0,18 persen poin dari Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang, mengalami penurunan sebesar 0,46 juta orang dari September 2022, dan 0,26 juta orang dari Maret 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi syariah muncul sebagai kerangka kerja yang memberikan pandangan yang unik dan bernilai tambah terhadap isu-isu sosial dan ekonomi. Distribusi pendapatan yang adil dan penanggulangan kemiskinan yang efektif merupakan tujuan sentral dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia sebagai nilai inti (Fitriasari, 2016).

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar merupakan tantangan krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Masalah ini menggambarkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang perlu diatasi untuk mencapai SDGs. Mengurangi tingkat kemiskinan tidak hanya menjamin hak dasar setiap individu untuk kehidupan yang layak, tetapi juga mendukung pencapaian target-target SDGs lainnya seperti pendidikan yang merata, kesehatan yang berkualitas, dan ketahanan pangan. Sebagai bagian integral dari SDGs, mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan menjadi tonggak utama dalam upaya menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan secara global (Khan, Yahong, & Zeeshan, 2022; Bagchi & Svejnar, 2015).

Kondisi ekonomi seseorang dapat dievaluasi dari dua sudut pandang, yaitu secara objektif dengan mengacu pada pendapatan individu berdasarkan garis kemiskinan, atau secara subjektif berdasarkan pengalaman kesulitan keuangan yang dirasakan oleh orang tersebut. Meskipun kedua perspektif ini berbeda, kemiskinan pendapatan dan persepsi tentang kesulitan keuangan cenderung saling terkait. Pendapatan yang rendah, terutama jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama, cenderung mempengaruhi persepsi individu terhadap kesulitan keuangan. Hasil utama dari data survei Luksemburg menunjukkan adanya pengaruh timbal balik antara kesulitan keuangan yang dirasakan di masa lalu dengan kemiskinan pendapatan saat ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi subjektif memiliki dampak nyata pada perilaku dan hasil ekonomi individu, menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor persepsi dalam analisis kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Ayllón & Fusco, 2017).

Pendekatan ekonomi Islam menekankan pada prinsip-prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan. Hal ini mencakup pengelolaan dana sosial (zakat dan infaq), prinsip keadilan distribusi (adil dalam berbagi kekayaan), dan penghindaran riba (bunga) yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam konteks distribusi pendapatan, pendekatan ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang cara-cara memperbaiki ketidaksetaraan dan memastikan bahwa kekayaan negara didistribusikan secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat (Ashraf, Hassan, & Hunt-Ahmed, 2013; Hassan & Ashraf, 2010).

Islam pada hakikatnya menjunjung tinggi martabat manusia yang direndahkan oleh adanya kemiskinan. Nabi Muhammad Saw. sendiri selalu berdo'a agar terlindung dari kemiskinan. Islam menekankan pada negara dan juga anggota masyarakat Muslim untuk secara aktif terlibat dalam memberi makan orang yang lapar, berinfak dan berbagi karunia Allah dengan sesama anggota masyarakat. Dalam Islam, cara mengatasi kemiskinan melibatkan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan dan sumber daya adalah anugerah dari Allah yang harus dibagikan secara adil. Ini mendorong kerjasama, berbagi, dan bertanggung jawab sosial melalui nilai-nilai seperti kustodian. Berbeda dengan pendekatan konsep konsumen yang hanya menekankan kebebasan konsumen, Islam mendorong tindakan positif untuk membantu orang lain, terutama ketika kita mampu melakukannya. Islam menolak penggunaan sumber daya hanya untuk barang-barang yang tidak penting, terutama saat banyak orang masih hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Pendekatan ini mengundang perdebatan tentang kebijakan pembangunan yang mementingkan keadilan sosial, terutama dalam lingkup ekonomi global (Ahmad, 1991).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia melalui lensa ekonomi Islam. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam analisis, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan khusus yang dihadapi Indonesia dalam mencapai distribusi pendapatan yang adil dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini akan menggali prospek masa depan dalam konteks ekonomi Islam, merinci strategi-strategi inovatif yang dapat diadopsi untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga akan membahas peran lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, dalam mendukung distribusi pendapatan yang adil dan mengurangi kemiskinan. Dengan memeriksa model-model ekonomi syariah yang telah terbukti efektif di negara-negara lain, penelitian ini akan merinci bagaimana Indonesia dapat mengadopsi praktek-praktek terbaik ini untuk mencapai tujuan distribusi pendapatan yang inklusif dan keadilan sosial.

Dengan pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam konteks ekonomi Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan inklusivitas. Melalui pendekatan holistik ini, Indonesia dapat memandu langkah-langkahnya menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua warganya, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong keberpihakan kepada yang membutuhkan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas.

TINJAUAN TEORITIK

Dalam memahami distribusi pendapatan dan kemiskinan dalam konteks ekonomi Islam, beberapa konsep dan prinsip dasar perlu dipertimbangkan. Tinjauan teoritik ini akan merinci landasan teoretis yang melandasi penelitian ini, menguraikan konsep-konsep kunci dalam ekonomi syariah yang relevan dengan distribusi pendapatan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Prinsip Keadilan dan Distribusi Pendapatan

Prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan elemen sentral dalam ekonomi syariah. Konsep ini mencakup pembagian kekayaan dan sumber daya yang adil di antara seluruh lapisan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, zakat, infaq, dan sedekah adalah instrumen keuangan yang menggalang kekayaan masyarakat dan mengarahkannya kepada yang membutuhkan. Prinsip ini menegaskan pentingnya distribusi yang merata dan inklusif, yang menciptakan kesejahteraan bagi semua (Kambali & Gresik, 2021).

Distribusi pendapatan merujuk pada proses penyaluran harta dari orang yang memiliki ke orang yang berhak menerimanya. Proses ini bisa melibatkan perdagangan komersial atau fokus pada aspek keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, distribusi pendapatan dan kekayaan terkait erat dengan nilai-nilai moral Islam, dimana keadilan dan kasih sayang (persaudaraan) menjadi prinsip utama. Pendekatan ini tidak hanya tentang kesejahteraan materi di dunia, tetapi lebih pada aspek moral, yakni bagaimana mencapai keberkahan di dunia dan akhirat (*falah*). Ini menekankan pentingnya distribusi yang adil dan kepedulian sosial dalam sistem ekonomi berbasis Islam (Kalsum, 2018).

Penghindaran Riba dan Ekonomi Berbasis Keuangan Syariah

Konsep penghindaran riba (bunga) adalah pilar utama dalam ekonomi Islam. Dalam sistem keuangan syariah, praktek-praktek bunga dihindari, dan instrumen-instrumen keuangan seperti mudarabah (kerjasama berbasis bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama

modal) digunakan. Ini menciptakan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan akses ke pembiayaan tanpa membebani mereka dengan bunga yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mendukung penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan (Fadilla, 2019).

Konsep penghindaran riba harus pula sejalan dengan memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat dan membuka peluang bagi perkembangan pengusaha kecil. Pembiayaan yang bersifat produktif akan meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan para pelaku. Menciptakan tingkat kesejahteraan yang setara adalah tujuan utama dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dengan memberikan dukungan finansial yang tepat, pembiayaan syariah dapat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi (Trimulato, Syamsu, & Octaviany, 2021).

Pemberdayaan Ekonomi Melalui Lembaga Keuangan Syariah

Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian dan mengatasi kemiskinan. Dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada keadilan dan keberpihakan kepada yang membutuhkan, lembaga-lembaga ini memberikan akses keuangan kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya diabaikan oleh sistem keuangan konvensional. Pemberdayaan ekonomi melalui lembaga-lembaga ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan kepada sektor UMKM (Hassan, Kazak, Adıgüzel, Gunduz, & Tayfur, 2023). Penelitian empiris telah secara konsisten menyoroti peran penting sektor keuangan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Studi ini mengidentifikasi adanya hubungan positif antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pertanyaan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab adalah sebab-akibat antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Apakah pembangunan keuangan memicu pertumbuhan ekonomi atau apakah pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan sektor keuangan, masih menjadi fokus debat yang tak terelakkan. Dalam kerangka pemikiran ini, dua perspektif muncul: pertama, bahwa permintaan akan layanan keuangan meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi; dan kedua, bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat menciptakan dorongan untuk perkembangan sektor keuangan. Sehingga, perdebatan ini terus berlanjut, menciptakan analogi dengan permasalahan klasik tentang "ayam dan telur" dalam konteks pembangunan ekonomi tradisional (Goldsmith, 1969; McKinnon, 1973; Shaw, Financial deepening in economic development).

Peran Sosial dan Kemanusiaan

Ekonomi Islam menggarisbawahi peran sosial dan kemanusiaan dalam pengelolaan distribusi pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Prinsip-prinsip seperti adil, keberpihakan kepada yang membutuhkan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat manusia mendefinisikan bagaimana distribusi pendapatan dan pembiayaan kemiskinan harus dikelola. Dalam perspektif ini, distribusi pendapatan yang merata dan penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama masyarakat (Qadir, 2021).

Distribusi pendapatan yang adil dan penanggulangan kemiskinan bukanlah sekadar masalah ekonomi, tetapi juga merupakan isu sosial dan kemanusiaan yang mendalam. Dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dan mencapai keberlanjutan sosial, peran sosial dan kemanusiaan memegang peran penting. Peran kemanusiaan menekankan pada kepedulian terhadap sesama. Dalam konteks distribusi pendapatan, ini mencakup pengelolaan dana sosial, seperti zakat dan infaq, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pemerintah, lembaga non-profit, dan individu kaya memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung program-program yang meningkatkan kualitas hidup orang-orang miskin (Iskandar, 2018). Selain pemerintah, masyarakat dan sektor swasta juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan berfokus pada aspek sosial dan kemanusiaan dalam distribusi pendapatan, kita dapat membangun dunia yang lebih berempati, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua orang (Ariani, 2023).

Melalui pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia, menyoroti tantangan-tantangan unik yang dihadapi negara ini dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan merinci prospek-prospek masa depan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan inklusif bagi semua warganya. Dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan kepada yang membutuhkan, penelitian ini berusaha membawa kontribusi signifikan dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menggali dan menganalisis informasi yang relevan mengenai distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Metode studi literatur adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pencarian, penelaahan, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, maupun sumber data yang didapatkan dari website-website yang terpercaya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan melakukan identifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang relevan, melakukan seleksi sumber literatur, analisis literatur, sintesis temuan dan menarik kesimpulan serta implikasi dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui tinjauan literatur yang mendalam terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam, beberapa temuan terkait tantangan yang signifikan dapat diidentifikasi, antara lain:

• HASIL

Ketidaksetaraan Pendapatan

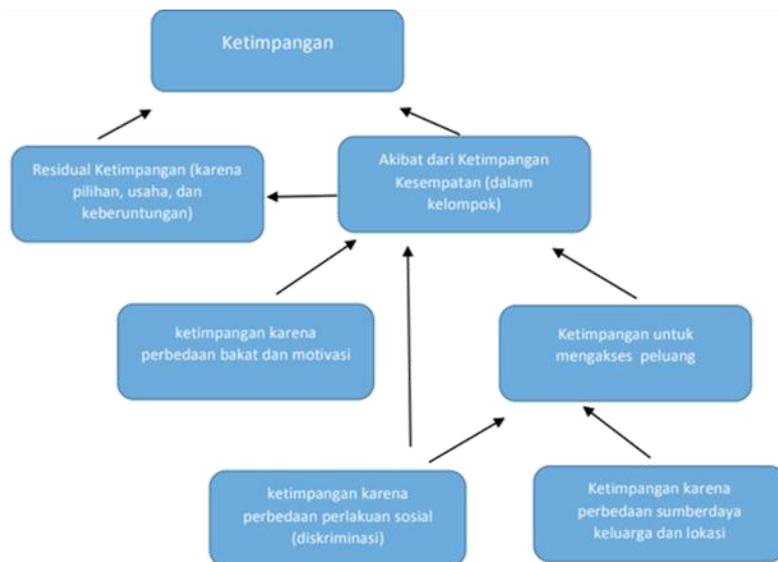
Ketimpangan yang tinggi membawa ancaman serius terhadap upaya pengentasan kemiskinan di masa depan dengan menghambat potensi pertumbuhan ekonomi. Adanya persepsi yang menunjukkan adanya kesenjangan absolut dalam standar hidup antara orang kaya dan orang miskin di negara-negara yang sedang berkembang juga didukung oleh bukti-bukti yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya mempengaruhi distribusi kekayaan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada kemungkinan mengurangi tingkat kemiskinan di masa mendatang (Ravallion, 2014).

Masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih merata cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik. Fakta terbaru menunjukkan bahwa masalah sosial seperti penyakit mental, kekerasan, penjara, kurang kepercayaan, kelahiran pada usia muda, obesitas, penyalahgunaan narkoba, dan hasil pendidikan yang buruk pada anak-anak sekolah lebih sering terjadi di masyarakat yang memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi (Wilkinson & Pickett, 2009).

Meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan, ketidaksetaraan pendapatan di Indonesia masih tinggi. Distribusi pendapatan yang tidak merata menjadi salah satu tantangan utama dalam mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Ketimpangan di Indonesia bahkan semakin memperbesar jurang antara si kaya dan si miskin (Theodora & Primantoro, 2023). Salah satu alasan utama dari peningkatan ketimpangan pengeluaran ini adalah meningkatnya konsumsi dari kelompok orang kaya. Sementara itu, pada periode yang sama, konsumsi dari kelompok menengah dan bawah tetap stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan (Mardiyanto, 2023).

Masalah ketimpangan jauh lebih rumit dibandingkan dengan kemiskinan dan seiring berjalannya waktu, ketimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Analisis menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, ketimpangan pendapatan di

Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 1990, 20 persen penduduk terkaya di Indonesia menguasai 39 persen total pengeluaran seluruh penduduk. Namun, pada tahun 2010, angka ini meningkat menjadi 44 persen, yang berarti 44 persen dari total pengeluaran berasal dari 20 persen orang terkaya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi semakin membesar seiring berjalannya waktu, menciptakan tantangan yang signifikan dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Wibowo, 2016).



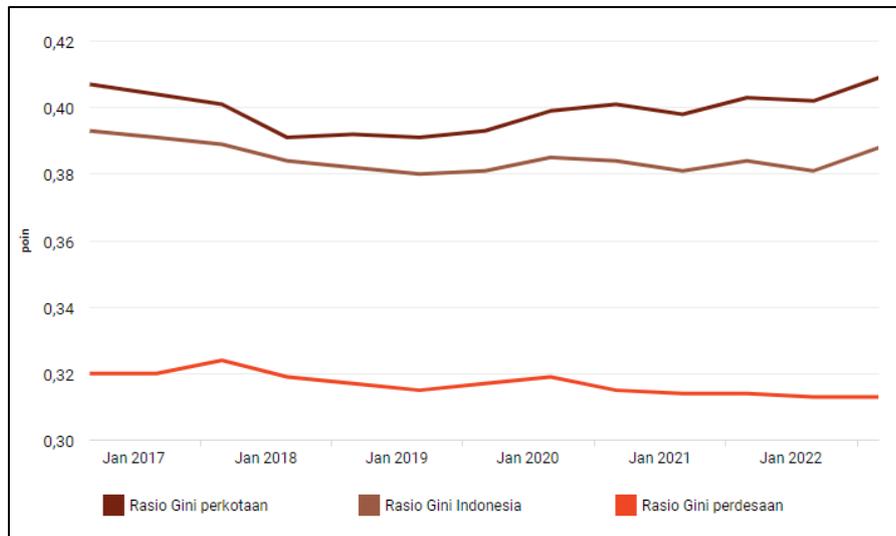
Gambar 1. Dekomposisi Ketimpangan

Sumber: (Barros, Ferreira, Vega, & Chanduvi, 2009)

Ketimpangan terlihat dalam berbagai hasil seperti pendapatan, pengeluaran per orang dalam rumah tangga, prestasi pendidikan, kesehatan, dan indikator sosial lainnya. Ketidaksetaraan ini muncul dari dua sumber utama. Kotak Utama adalah ketimpangan yang terkait dengan perbedaan individual, seperti ras, jenis kelamin, status keluarga, kondisi sosial, tempat kelahiran, serta cacat mental atau fisik yang ada sejak lahir. Sedangkan sumber ketidaksetaraan lainnya (komponen residual) disebabkan oleh pilihan individu atau keberuntungan dalam hidup mereka. Dengan kata lain, beberapa orang memiliki lebih sedikit akses dan kesempatan karena faktor-faktor ini, menciptakan ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan (Wibowo, 2016).

Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia menggunakan rasio Gini, yang diukur dalam skala 0 hingga 1. Pada Maret 2023, rasio Gini mencapai 0,388 poin, menunjukkan tingkat ketimpangan yang signifikan. Ketidaksetaraan ini lebih mencolok di perkotaan, di mana rasio Gini mencapai 0,409 poin pada periode yang sama. Sebuah nilai rasio Gini sebesar 0 mencerminkan kesetaraan sempurna, artinya semua penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama, sementara nilai 1 mencerminkan

ketimpangan sempurna, yang berarti satu penduduk memiliki seluruh pengeluaran per kapita sementara yang lain tidak memiliki sama sekali. Dengan peningkatan rasio Gini, tingkat ketidaksetaraan dalam suatu daerah semakin tinggi.



Gambar 2. Tren Ketimpangan Pengeluaran/Rasio Gini Indonesia Berdasarkan Daerah (Maret 2017-Maret 2023)
Sumber: (Santika, 2023)

Peran Ekonomi Islam

Islam adalah agama universal yang mencakup semua umat manusia. Pendekatan dan solusi untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya terbatas pada umat Islam, melainkan juga relevan untuk seluruh dunia. Namun, dalam konteks zaman sekarang, ambisi tersebut mungkin terlalu besar. Sebagai gantinya, kita sebaiknya mengevaluasi potensi ekonomi Islam dalam mengatasi tantangan kemiskinan di komunitas Muslim, daripada mencoba menghadapi tantangan kemiskinan di seluruh dunia dengan mencoba merangkul Islam secara global yang berskala lebih besar.

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai studi sistematis tentang masalah alokasi sumber daya, produksi barang dan jasa serta distribusi output, pendapatan dan kekayaan dalam suatu perekonomian berdasarkan Alquran dan Sunnah. Ilmu ini memiliki relevansi tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi orang lain yang tertarik dengan solusi jangka panjang untuk masalah krisis keuangan, inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekonomi. Disiplin ilmu ini berkaitan dengan deskripsi (realitas di lapangan) dan resep (solusi untuk masalah ekonomi) dalam terang petunjuk Alquran dan Sunnah (Tahir, 2017).

Dalam setengah abad terakhir, ekonomi Islam dikalahkan oleh gerakan keuangan Islam. Secara bertahap ekonomi Islam telah mengambil tempat di belakang tanpa ada ekonomi yang mendukungnya secara empiris. Meskipun keuangan Islam muncul sebagai cabang dari ekonomi Islam dan dengan restu dan dukungan dari para ekonom Islam, pola-

pola keuangan Islam yang ada saat ini secara nyata terlepas dari tujuan-tujuan pembangunan yang lebih luas. Meskipun wacana ekonomi Islam membahas masalah kemiskinan, namun wacana tersebut membahasnya secara perifer, marjinal, dan dangkal. Ekonomi Islam tidak mengidentifikasi kemiskinan sebagai fokus utamanya. Sebaliknya, ekonomi Islam muncul sebagai tandingan dari ekonomi konvensional, yang mencoba mendefinisikan aksioma-aksioma serta kerangka kerja analitis-kebijakan. Meskipun sejak masa-masa awal Nabi, pengejaran keadilan dan empati yang kuat terhadap orang miskin dan yang kurang beruntung telah menjadi prinsip utama, dan meskipun dibiayai terutama melalui rampasan perang dari penaklukan, sejarah awal menunjukkan komitmen dan upaya teladan untuk membantu orang miskin melalui program-program redistribusi, lambat laun isu kemiskinan menjadi isu perifer. Tidak ada program sistematis untuk menghadapi kemiskinan yang berkembang sepanjang sejarah. Meskipun secara retorik kita menemukan pernyataan dan artikulasi yang saleh tentang sikap anti-kemiskinan dalam literatur umum tentang Islam dan ekonomi Islam pada khususnya, ada kecenderungan reduksionisme bahwa jika riba dihapuskan dan zakat dilembagakan dengan baik, masalah kemiskinan akan teratasi. Sayangnya, dalam hal tantangan kemiskinan, ekonomi Islam sendiri mengalami kemiskinan konseptual. Karena ekonomi tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial-politik yang lebih besar, maka ekonomi Islam juga tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut (Farooq, 2008).

Ekonomi Islam secara bertahap telah menjadi bidang intelektual murni, dikalahkan oleh cabang-cabangnya sendiri, yaitu keuangan Islam dan terputus dari pembangunan ekonomi yang lebih luas. Seperti yang diakui dan disesalkan oleh Mohammad Nejatullah Siddiqi, salah seorang perintis di antara para ekonom Islam bahwa pertimbangkan fokus para ekonom Islam saat ini pada keuangan Islam dan kelangkaan literatur ekonomi Islam tentang pengentasan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pembangunan (Siddiqi, 2008). Pernyataan ini jika diistilahkan oleh Andri Soemitra, ibarat menyiapkan bus tetapi penumpangnya tidak ada (Soemitra, 2023). Meskipun keuangan Islam telah menjadi primadona dan mengalami pertumbuhan yang eksplosif, pada dasarnya keuangan Islam adalah industri yang digerakkan oleh larangan, dimana produk dan jasanya disajikan sebagai sesuai dengan syariah, tetapi terutama dalam pengertian legalistik. Yang lebih buruk lagi adalah eksploitasi situasi ini oleh sebagian pasar untuk menawarkan barang-barang konvensional dengan bungkus Islam yang dangkal atas nama Islam (Siddiqi, 2008).

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika industri keuangan Islam tumbuh, namun tanpa dampak yang diinginkan terhadap realitas sosio-ekonomi yang mempengaruhi sebagian besar umat Islam yang hidup dalam kemiskinan. Memang, bukan hanya pengentasan atau pemberantasan kemiskinan yang tidak menjadi fokus ekonomi atau keuangan Islam sejauh ini, tetapi, karena didorong oleh larangan, ekonomi dan keuangan Islam belum menemukan

cara-cara kreatif untuk menghadapi tantangan kemiskinan dan juga tidak mendapatkan manfaat yang berarti dari pengalaman kontemporer dalam menghadapi kemiskinan (Farooq, 2008).

Pengelolaan Zakat dan Infaq

Sejak awal sejarah Islam, zakat memiliki peran penting tidak hanya dalam mengurangi kemiskinan, tetapi juga dalam memastikan pembangunan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung (Khan M. F., 2007; Sulaiman, 2003). Tidak diragukan lagi, zakat merupakan alat yang diberikan oleh Tuhan yang terbukti efektif dalam Islam untuk mengatasi kemiskinan, baik dalam masyarakat umum maupun khususnya masyarakat Muslim. Sejarah menunjukkan bahwa dengan menerapkan sistem ekonomi berbasis zakat, kemiskinan telah berhasil diatasi di Madinah dan Jazirah Arab pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. dan para penerusnya. Akibatnya, umat Islam sulit menemukan orang miskin dan kelaparan yang membutuhkan bantuan zakat karena keberhasilan sistem ini dalam mencabut kemiskinan dari masyarakat (Hoque, Ali, & Rahman, 2013).

Hakikatnya, zakat harus dihubungkan dengan permasalahan kemiskinan yang berakar, bukan hanya memberikan bantuan terhadap keadaan miskin secara insidental. Pendekatan ini menekankan pada perlunya menggunakan zakat sebagai alat untuk mengatasi kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan dalam masyarakat. Zakat dan pendapatan dari wakaf dapat diintegrasikan ke dalam sistem pembiayaan mikro untuk memberi manfaat bagi penerima manfaat yang paling miskin. Zakat yang diberikan kepada masyarakat miskin dapat digunakan untuk tujuan konsumsi, pengembangan aset, dan produksi untuk melengkapi dana LKM syariah. Dana pelengkap ini dapat diberikan dalam bentuk hibah atau pinjaman tanpa bunga (*qard-hasan*) sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat (El-Gamal, 2007).

Keduanya memang dapat diintegrasikan, dan ada gagasan dan upaya yang disambut baik untuk melakukannya, namun tidak berarti bahwa upaya yang serius dan memadai dari pihak industri keuangan Islam untuk menuju ke arah tersebut secara sistematis (Ahmed, 2002). Hal ini pula yang menjadikan pengelolaan dana sosial, terutama zakat dan infaq, memiliki potensi besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun, selalu saja muncul problematika dalam hal pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan dana zakat secara efektif dan transparan.

• PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa prospek masa depan pada distribusi pendapatan yang lebih adil dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, antara lain:

Penguatan Literasi Ekonomi Islam

Menurut survei Bank Indonesia tahun 2022, indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional hanya mencapai 23,3% (KOMINFO, 2023), masih jauh dari indeks ideal minimal, yang seharusnya mencapai 75% (Soediro, et al., 2021). Ini menunjukkan perlunya upaya keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, baik melalui pendidikan formal, kampanye sosialisasi, maupun kerjasama lintas sektor, sambil memanfaatkan teknologi digital. Dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah, upaya menuju masyarakat yang melek ekonomi dan aktif secara finansial di Indonesia cenderung berjalan lambat. Faktor seperti kurangnya pelajaran ekonomi dan keuangan dalam kurikulum sekolah dapat menghambat persiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan ekonomi. Meskipun telah ada upaya untuk mendidik masyarakat di luar sekolah, memberdayakan pendidikan keuangan di lingkungan sekolah dapat secara signifikan mempercepat progres menuju masyarakat yang melek finansial (Amidjono, Brock, & Junaidi, 2016).

Dinamisasi ekonomi yang begitu cepat, mengharuskan masyarakat memiliki wawasan yang kuat terhadap ekonomi, termasuk wawasan terhadap ekonomi Islam (Hashim & Kayode, 2013). Salah satu jalan memiliki wawasan adalah dengan penguatan literasi. Penguatan literasi ekonomi Islam sesuai dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi pancasila yang menjadi dasar negara. Konsep ini juga sesuai dengan pandangan Mannan bahwa ekonomi Islam bisa berdampingan dengan sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi (Nugraha, Al Hakim, Jubaedah, Julian, & Athoillah, 2023).

Salah satu cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pekerjaan yang berkelanjutan. Langkah ini melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat melalui literasi ekonomi Islam. Dengan memahami hakikat dari ekonomi Islam, berbagai pihak dapat membangun langkah-langkah yang dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Pendekatan ini tidak hanya memberdayakan individu secara ekonomi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Islam, 2004). Penguatan literasi ekonomi syariah juga akan membuka akses bagi permodalan sesuai syariat Islam, yang pada akhirnya akan memudahkan para wirausahawan dan berbagai pihak meningkatkan kesejahteraan hidup.

Optimalisasi *Islamic Philantrophy* dan *Islamic Finance*

Umat Islam memiliki potensi yang besar untuk secara signifikan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan dengan melibatkan diri dalam kegiatan kewirausahaan. Mereka dapat mencapainya dengan memobilisasi dana zakat secara bijaksana dan disengaja. Dengan memanfaatkan zakat dengan cara yang cerdas, umat Islam dapat menciptakan

peluang ekonomi baru, mendukung pengembangan bisnis kecil dan menengah, serta memberdayakan orang-orang miskin. Tindakan ini tidak hanya akan mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Hoque, Khan, & Mohammad, 2015).

Untuk mencapai keadilan sosial yang berarti, semua sumber daya manusia harus digunakan dengan efisien dan adil untuk memenuhi kebutuhan semua orang serta menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (Sadeq, 1996). Oleh karena itu, dalam Islam, pentingnya keadilan distributif ditekankan, dan ini diintegrasikan dalam upaya memperkuat persaudaraan di antara umat Islam. Hal ini diwujudkan melalui pengumpulan dan distribusi zakat serta penerapan hukum waris sesuai ajaran Islam, yang bertujuan untuk mempercepat distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat (Dogarawa, 2009).

Penyebab kemiskinan bukan karena kurangnya sumber daya, namun lebih disebabkan oleh kurangnya kewirausahaan (Gupta & Srinivasan, 1992; Hoque, Ali, & Rahman, 2013). Mengembangkan kewirausahaan melalui zakat untuk pengentasan kemiskinan merupakan konsep baru yang membuka ruang perdebatan dan diskusi. Indonesia harus mengambil peran sebagai pelopor yang memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan (dengan mempertimbangkan syariat Islam). Dalam hal ini, pemerintah harus menggunakan setiap kesempatan dan pilihan secara efektif dan efisien.

Berbagai pihak juga harus mempermudah akses pada modal, bukan sekedar tersedianya Lembaga keuangan Islam. Moralitas dan kemanusiaan harus dijunjung tinggi pada setiap lembaga yang mengikutsertakan “Islam” dalam *core* bisnisnya, bukan sekedar *profit oriented* (Muheramtohad, 2017). Hanya dengan pendekatan yang holistik dan etika bisnis yang kuat, ekonomi masyarakat dapat terbantu secara berkelanjutan dan membawa kesejahteraan.

Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi sosial, dan masyarakat sipil, perlu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata dan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif. Penting pula bagi pemerintah, sektor swasta, dan pihak-pihak terkait untuk menggalakkan investasi dalam modal sosial rumah tangga. Langkah ini penting untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat (Rustiadi & Nasution, 2017). Lembaga-lembaga ini memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, meskipun seringkali kepentingan antara pemerintah dan sektor swasta berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain (VanSandt & Sud, 2012). Pemerintah sebagai ‘pemain utama’

dalam mendistribusikan pendapatan dan pengentasan kemiskinan harus mampu merumuskan arah kebijakan yang berfokus pada dua hal tersebut dengan membuat *mapping* dan *blue print*, sehingga para *stakeholder* lainnya tidak berjalan sendiri-sendiri dan menjalankan kepentingan masing-masing (Pham & Mukhopadhyaya, 2022).

Peran perusahaan sendiri telah terbukti mampu menekan angka kemiskinan (Medina-Muñoz & Medina-Muñoz, 2019), organisasi sosial dalam membentuk entitas baru (Aziz & Mohamad, 2016), begitupula dengan masyarakat sipil dengan membentuk kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru (Iwu, Gwijja, Tengeh, Cupido, & Mason, 2016; Fahrudi & N.L.I, 2020)

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia memiliki potensi untuk memperkuat ekonomi Islam, meningkatkan distribusi pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kerjasama antara berbagai pihak dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini, menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan di masa depan.

KESIMPULAN

Dalam konteks ekonomi Islam di Indonesia, penanggulangan ketidaksetaraan distribusi pendapatan dan kemiskinan memerlukan strategi holistik dan kolaboratif. Meskipun tantangan ketidakmerataan ekonomi masih ada, potensi besar ekonomi Islam dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi kemiskinan harus diakui. Pentingnya literasi ekonomi Islam menjadi landasan yang mendasar, sementara pengelolaan dana sosial seperti zakat perlu dioptimalkan dengan partisipasi aktif masyarakat. Peran pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat vital dalam merancang kebijakan yang mendukung distribusi pendapatan yang lebih adil. Dengan kerjasama yang baik dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kemajuan ekonomi yang inklusif dan mengatasi masalah ketimpangan sosial serta kemiskinan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. (1991). *Islam, poverty and income distribution*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Ahmed, H. (2002). Financing Microenterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions. *Islamic Economic Studies*, 9(2), 27-64.
- Amidjono, D., Brock, J., & Junaidi, E. (2016). International Handbook of Financial Literacy. In *Financial Literacy in Indonesia*. Singapore: Springer. doi:https://doi.org/10.1007/978-981-10-0360-8_18

- Ariani. (2023). Distribusi Pendapatan. In *Pengantar Ilmu Ekonomi* (p. 59). Bali: Infess Media.
- Ashraf, A. L., Hassan, M. K., & Hunt-Ahmed, K. (2013). An integrated islamic poverty alleviation model. In *Contemporary Islamic Finance* (pp. 223-244). Wiley.
- Ayllón, S., & Fusco, A. (2017). Are income poverty and perceptions of financial difficulties dynamically interrelated? *Journal of Economic Psychology*, 61, 103-114. doi:<https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.03.008>
- Aziz, M., & Mohamad, O. (2016). Islamic social business to alleviate poverty and social inequality. *International Journal of Social Economics*, 43(6), 573-592. doi:<https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2014-0129>
- Badan Pusat Statistik. (2023, Juli). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Bagchi, S., & Svejnar, J. (2015). Does wealth inequality matter for growth? The effect of billionaire wealth, income distribution, and poverty. *Journal of Comparative Economics*, 43(3), 505-530. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.04.002>
- Barros, R. P., Ferreira, F. H., Vega, J. R., & Chanduvi, J. S. (2009). *Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the Caribbean*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Dogarawa, A. B. (2009). Poverty Alleviation through Zakah and Waqf Institutions: A Case for the Muslim Ummah in Ghana. *SSRN*, 1-28. doi:<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1622122>
- El-Gamal, M. (2007). Mutuality as an antidote to rent-seeking Shariah arbitrage in Islamic finance. *Thunderbird International Business Review*, 49(2), 187-202.
- Fadilla, J. (2019). Peranan perbankan syariah terhadap pengembangan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Al-Tijary*, 5(1), 49-58. doi:<https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1783>
- Fahrudi, & N.L.I, A. (2020). Alleviating Poverty through Social Innovation. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 14(1), 71-78. doi:[doi:10.14453/aabfj.v14i1.7](https://doi.org/10.14453/aabfj.v14i1.7)
- Farooq, M. O. (2008). The Challenge of Poverty and the Poverty of Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(2), 35-58.
- Fitriasari, F. (2016). Sinergi ekonomi Islam untuk menanggulangi kemiskinan. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 49-63.
- Goldsmith, R. (1969). *Financial structure and development*. Yale : University Press, New Haven.
- Gupta, C. B., & Srinivasan, N. P. (1992). *Entrepreneurial development*. New Delhi: Sultan Chand & Sons.
- Hashim, C. N., & Kayode, B. K. (2013). Economics literacy among university students: A case study of International Islamic University Malaysia (IIUM). *World Applied Sciences Journal*, 28(6), 871-875. doi:[10.5829/idosi.wasj.2013.28.06.1071](https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.28.06.1071)
- Hassan, M. K., & Ashraf, A. (2010). An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance. *Seventh International Conference—The Tawhidic Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, (pp. 261-281). Bangi, Malaysia.
- Hassan, M. K., Kazak, H., Adıgüzel, U., Gunduz, M. A., & Tayfur, A. (2023). Convergence in Islamic Financial Development: Evidence from Islamic Countries Using the Fourier

- Panel KPSS Stationarity Test. *Borsa Istanbul Review*, 1-23.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.09.006>
- Hoque, N., Ali, M. M., & Rahman, B. M. (2013). Islamic resurgence movements in bangladesh: experiences from Iran and Turkey. *World J Islamic History Civilization*, 3(2), 73-84.
doi: 10.5829/idosi.wjihc.2013.3.2.3205
- Hoque, N., Khan, M., & Mohammad, K. (2015). Poverty alleviation by Zakah in a transitional economy: a small business entrepreneurial framework. *J Glob Entrepr Res*, 5(7).
doi:<https://doi.org/10.1186/s40497-015-0025-8>
- Iskandar, I. (2018). Islamic Economics as A New Current of Economic Development in Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 150-158.
doi:<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.150-158>
- Islam, R. (2004). *The nexus of economic growth, employment and poverty reduction: An empirical analysis* (14 ed.). Geneva: Recovery and Reconstruction Department, International Labour Office.
- Iwu, C. G., Gwija, S., Tengeh, R., Cupido, C., & Mason, R. B. (2016). The unique role of the survivalist retail entrepreneur in job creation and poverty reduction. implications for active stakeholder participation. *Acta Universitatis Danubius (Economica)*, 12(4).
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 41-59.
doi:<http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>
- Kambali, M., & Gresik, S. A. (2021). Konsep Kepemilikan dan Distribusi Pendapatan dalam Sistem Ekonomi Islam. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 126-150. doi:<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.254>
- Khan, M. F. (2007). *Integrating Faith-based Institutions (Zakah and Awqaf) in Poverty Reductions Strategies (PRS)*. Retrieved from <https://baitalzakat.com/files/english-files/baitalzakat.com-E100043.pdf>
- Khan, S., Yahong, W., & Zeeshan, A. (2022). Impact of poverty and income inequality on the ecological footprint in Asian developing economies: Assessment of Sustainable Development Goals. *Energy Reports*, 8, 670-679.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.12.001>
- KOMINFO. (2023). *Wapres Harapkan Literasi Masyarakat tentang Ekonomi Keuangan Syariah Meningkat*. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/48303/wapres-harapkan-literasi-masyarakat-tentang-ekonomi-keuangan-syariah-meningkat/o/berita>
- Mardiyanto, A. (2023). *Pemulihan Tidak Merata, Ketimpangan Semakin Tajam*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/17/pemulihan-tidak-merata-ketimpangan-semakin-tajam>
- McKinnon, R. (1973). *Money and capital in economic development*. Washington DC: The Brookings Institution.
- Medina-Muñoz, R. D., & Medina-Muñoz, D. R. (2019). Corporate social responsibility for poverty alleviation: An integrated research framework. *Business Ethics: A European Review*, 3-19. doi:<https://doi.org/10.1111/beer.12248>
- Muheramtohad, S. (2017). Peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65-77.
doi:<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>

- Nugraha, A. L., Al Hakim, S., Jubaedah, D., Julian, A., & Athoillah, M. A. (2023). Islamic Economic Literacy: A Paradigma Economic Thought In Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(1), 18-28.
- Pham, A., & Mukhopadhyaya. (2022). P. Multidimensionl Poverty and The Role of Social Capital in Poverty Alleviation Among Ethnic Groups in Rural Vietnam: A Multilevel Analysis. *Soc Indic Res* , 159, 281–317. doi:<https://doi.org/10.1007/s11205-021-02747-y>
- Qadir, A. (2021). Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam. *Mozaic: Islam Nusantara*, 7(1), 47-60. doi:<https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i1.174>
- Ravallion, M. (2014). Income inequality in the developing world. *Science*, 344, 851-855. doi:[0.1126/science.1251875](https://doi.org/10.1126/science.1251875)
- Rustiadi, E., & Nasution, A. (2017). Can Social Capital Investment Reduce Poverty in Rural Indonesia? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 109-117.
- Sadeq, A. M. (1996). Ethico-Economic Institution of Zakah: An Instrument of Self-Reliance and Sustainable Grassroot Development. *Humanomics*, 12(2), 47-69. doi:<https://doi.org/10.1108/eb018775>
- Santika, E. F. (2023, 7). *Tren Ketimpangan Pengeluaran/Rasio Gini Indonesia Berdasarkan Daerah (Maret 2017-Maret 2023)*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2023/07/18/ketimpangan-ekonomi-di-indonesia-meningkat-pada-maret-2023>
- Shaw, E. (Financial deepening in economic development). 1973. New York: Oxford University Press.
- Siddiqi, M. N. (2008). Obstacles to Islamic Economics Research. *Seventh International Conference on Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Economics Research Center. Retrieved from http://www.siddiqi.com/mns/OBSTACLES_TO_ISLAMIC_ECONOMICS_RESEARCH.htm
- Soediro, A., Farhan, M., Adhitama, F., Yusrianti, H., Bashir, A., & Hamidi, I. (2021). Literasi Ekonomi Islam menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 39-46. doi:[10.29259/jscs.v2i1.34](https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.34)
- Soemitra, A. (2023). Isu Kontemporer Keuangan Syariah. *Perkuliahan Program Doktor Ekonomi Syariah*. Medan.
- Sulaiman, M. (2003). The influence of riba and zakat on Islamic accounting. *Indonesian Manag Accounting Rev*, 2(2), 149–67.
- Tahir, S. (2017). Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30(1).
- Theodora, A., & Primantoro, A. Y. (2023, Juli 18). *Pemulihan Tidak Merata, Ketimpangan Semakin Tajam*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/17/pemulihan-tidak-merata-ketimpangan-semakin-tajam>
- Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19-38. doi:<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>

- VanSandt, C., & Sud, M. (2012). Poverty Alleviation through Partnerships: A Road Less Travelled for Business, Governments, and Entrepreneurs. *J Bus Ethics*, 110, 321–332. doi:<https://doi.org/10.1007/s10551-011-1160-y>
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 20(2), 111-132.
- Wilkinson, R. G., & Pickett, K. E. (2009). Income Inequality and Social Dysfunction. *Annual Review of Sociology*, 35, 493-511. doi:<https://doi.org/10.1146/annurev-soc-070308-115926>